

HUBUNGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FENOMENA LGBT DI KAMPUS

Atiek Rohmiyati¹, Zainul Hakim², Rafa Hartono Putra³

Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta^{1,2,3}

Email : atiek@polimedia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di kalangan mahasiswa, yang menimbulkan gesekan dengan tatanan hukum dan sosial-religius di Indonesia. Adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif yang dianut bangsa dengan realitas gaya hidup yang berkembang mendorong perlunya evaluasi peran pendidikan dalam membentuk karakter. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan persepsi dan perilaku mahasiswa terhadap fenomena LGBT di lingkungan kampus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner berskala Likert kepada 353 mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Data yang terkumpul dianalisis secara statistik menggunakan uji *chi-square* untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel. Temuan utama menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik ($p = 0.038 < 0.05$) antara PKn dengan persepsi mahasiswa. Mayoritas responden (83,7%) yang memiliki perilaku seksual positif (sesuai norma) juga menunjukkan persepsi positif, yang dalam konteks ini berarti menolak praktik LGBT berdasarkan landasan hukum dan agama, namun tetap mampu berinteraksi secara humanis. Disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan efektif dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman nilai-nilai kebangsaan untuk membentengi diri dari perilaku menyimpang, sekaligus menumbuhkan sikap toleran dalam interaksi sosial.

Kata Kunci: *Fenomena LGBT, Pendidikan Kewarganegaraan dan Perilaku Mahasiswa*

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing phenomenon of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) among university students, which has created friction with the legal and socio-religious order in Indonesia. The gap between the normative values adopted by the nation and the reality of developing lifestyles encourages the need to evaluate the role of education in shaping character. Therefore, this study focuses on analyzing the relationship between Civics Education (PKn) and students' perceptions and behaviors towards the LGBT phenomenon on campus. This study uses a quantitative approach by distributing a Likert-scale questionnaire to 353 students at the Jakarta State Polytechnic of Creative Media. The collected data were analyzed statistically using the chi-square test to test the hypothesis of the relationship between variables. The main findings indicate a statistically significant relationship ($p = 0.038 < 0.05$) between PKn and students' perceptions. The majority of respondents (83.7%) who have positive sexual behavior (in accordance with norms) also show positive perceptions, which in this context means rejecting LGBT practices based on legal and religious grounds, while still being able to interact humanely. It is concluded that Civic Education is effective in equipping students with an understanding of national values to protect themselves from deviant behavior, while also fostering a tolerant attitude in social interactions.

Keywords: *LGBT Phenomenon, Civic Education, Students Attitude*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang pesat dan tak terkendali telah membawa serta serangkaian tantangan sosial yang kompleks, khususnya bagi generasi remaja. Berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), pernikahan dini, serta seks bebas telah menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa (BKKBN, 2019). Di tengah arus problematika tersebut, muncul pula fenomena penyimpangan perilaku seksual, di mana salah satu isu yang paling menonjol dan memicu perdebatan luas di ruang publik adalah gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) (Oktarini et al., 2025). Fenomena ini tidak hanya menjadi diskursus di tingkat global, tetapi juga telah merambah ke dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia, menimbulkan berbagai respons dan keprihatinan. Kehadirannya menantang nilai-nilai, norma, dan struktur sosial yang telah lama mapan, sehingga menuntut adanya perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari dunia pendidikan, untuk dapat menyikapinya secara bijak dan konstruktif demi menjaga ketahanan sosial dan karakter bangsa (Khusnan & Syaifullah, 2021).

Secara ideal, tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia dibangun di atas fondasi falsafah negara, Pancasila, serta nilai-nilai agama yang luhur. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," secara eksplisit menegaskan bahwa moralitas dan etika bangsa bersumber dari ajaran agama. Konsekuensinya, berbagai peraturan perundang-undangan dan norma sosial di Indonesia merefleksikan nilai-nilai religius tersebut. Salah satu contoh paling konkret adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Kerangka hukum dan sosial ini mencerminkan pandangan ideal masyarakat Indonesia mengenai institusi keluarga dan hubungan antarmanusia yang selaras dengan fitrah dan ajaran agama. Pandangan ini diperkuat oleh lembaga-lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melalui fatwanya turut memberikan panduan moral bagi masyarakat. Dengan demikian, kerangka normatif yang berlaku di Indonesia secara jelas tidak memberikan ruang bagi legalisasi maupun normalisasi praktik LGBT (Adawiyah et al., 2023; Qomarauzzaman, 2017).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tatanan ideal tersebut dengan fenomena yang terjadi. Gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menunjukkan kehadiran yang semakin nyata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 mengindikasikan adanya lebih dari satu juta Lelaki yang Berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) yang tersebar di berbagai provinsi, dengan angka tertinggi tercatat di Jawa Barat. Fenomena ini juga diiringi dengan isu kesehatan masyarakat yang serius, yakni tingginya prevalensi penderita HIV/AIDS di kalangan komunitas tersebut. Kondisi ini diperumit oleh peran media massa dan media sosial yang kerap menampilkan figur-figur dengan kecenderungan LGBT dalam bingkai yang mengarah pada persepsi kelumrahan. Akibatnya, terjadi benturan nilai yang tajam antara norma agama dan sosial yang dianut mayoritas masyarakat dengan realitas gaya hidup yang semakin terbuka dipromosikan (Izzuddin & Cahyadi, 2025; Yuliati, 2023).

Penolakan masyarakat Indonesia terhadap eksistensi LGBT bukanlah tanpa dasar, melainkan berakar kuat pada perspektif teologis, sosial, dan psikologis yang telah lama mapan (Harahap, 2018). Sebuah penelitian yang mendalami persepsi komunitas LGBT di Jakarta mengidentifikasi beberapa alasan utama di balik penolakan ini (Arivia & Gina, 2016). Alasan fundamental yang pertama adalah keyakinan mayoritas masyarakat bahwa hubungan sesama jenis dilarang keras oleh ajaran agama. Pandangan ini ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur'an, misalnya dalam Surat Asy-Syu'arā' ayat 165-166, yang mengutuk perbuatan homoseksual. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 secara eksplisit

mengharamkan segala bentuk aktivitas LGBT. Pandangan ini tidak hanya eksklusif bagi agama Islam, tetapi juga dianut oleh agama-agama lain yang diakui di Indonesia. Akibatnya, LGBT secara luas dianggap sebagai bentuk penyimpangan, perbuatan dosa, dan penyakit sosial yang menyalahi kodrat dan perintah Tuhan.

Lingkungan perguruan tinggi menjadi salah satu arena yang rentan terhadap penyebaran berbagai ideologi dan gaya hidup, termasuk fenomena LGBT. Mahasiswa, yang berada pada rentang usia muda dan dalam fase pencarian jati diri, merupakan kelompok yang secara psikologis mudah terpengaruh oleh tren dan wacana baru di sekitar mereka. Masa transisi dari remaja menuju dewasa seringkali ditandai dengan eksplorasi identitas dan nilai-nilai, yang membuat mereka menjadi sasaran strategis bagi berbagai gerakan sosial. Kampus, sebagai pusat interaksi intelektual dan sosial, menjadi tempat bertemunya beragam pemikiran dan latar belakang. Kondisi ini, di satu sisi, sangat positif untuk pengembangan wawasan, namun di sisi lain, juga membuka celah bagi masuknya pengaruh yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang komprehensif dan kritis di kalangan mahasiswa mengenai fenomena LGBT agar mereka dapat membentengi diri dan lingkungannya dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan (Adawiyah et al., 2023; Indrawadi et al., 2021).

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan yang sangat strategis. PKn bukanlah sekadar mata kuliah yang mentransfer pengetahuan tentang sistem ketatanegaraan, melainkan sebuah konsep pendidikan karakter yang fundamental. Misi utamanya adalah membentuk generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*), yang mampu berpikir kritis terhadap berbagai isu sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui PKn, mahasiswa diajak untuk tidak hanya memahami realitas sosial di sekeliling mereka, tetapi juga belajar bagaimana cara memecahkan masalah sosial tersebut secara konstruktif. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi diri mahasiswa melalui tiga pilar utama: pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*). Dengan bekal ini, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan koridor nilai-nilai Pancasila (Manurung & Yunita, 2024; Rahmani et al., 2022; Utami & Najicha, 2022).

Nilai kebaruan dan urgensi penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengkaji secara spesifik fenomena LGBT dalam konteks lingkungan kampus serta mengevaluasi peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen pembinaan karakter mahasiswa. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan kajian dengan mengungkap sejauh mana fenomena LGBT telah memengaruhi mahasiswa di Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Jakarta. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kurikulum dan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ada saat ini telah memberikan bekal yang cukup bagi mahasiswa untuk dapat membentengi diri dan lingkungannya dari pengaruh fenomena tersebut. Namun, tujuan pembentengan diri ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan sikap eksklusif, melainkan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki pendirian kokoh berlandaskan Pancasila, namun tetap mampu berinteraksi secara baik dan humanis dengan siapa pun dalam kerangka kebhinekaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif. Metodologi ini dipilih karena bertujuan untuk mengungkap realitas sosial secara faktual dan mendalam, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sejalan dengan

kerangka penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Moleong (2007), studi ini berupaya memahami fenomena secara holistik dari sudut pandang subjek, termasuk perilaku, persepsi, dan motivasi mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, subjek penelitian dipilih dari sejumlah mahasiswa Polimedia Jakarta melalui teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik ini memungkinkan peneliti untuk secara sengaja memilih informan yang dianggap paling relevan dan mampu memberikan data yang kaya serta mendalam sesuai dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap fenomena LGBT di lingkungan kampus mereka. Dengan demikian, pendekatan ini memastikan bahwa data yang terkumpul benar-benar representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan strategi triangulasi dengan menggabungkan tiga teknik utama, yaitu observasi, studi dokumentasi, dan penyebaran kuesioner. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung interaksi dan peristiwa yang terjadi di lapangan, sementara studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang relevan. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner yang ditujukan kepada mahasiswa Polimedia Jakarta. Data yang terkumpul dari kuesioner kemudian ditabulasi secara sistematis dan dianalisis menggunakan skala Likert. Penggunaan skala ini bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif sejauh mana tingkat dan kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap fenomena LGBT di sekitar mereka. Kombinasi dari ketiga teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh, di mana setiap metode saling melengkapi untuk menghasilkan data primer yang valid dan dapat diandalkan.

Data primer yang telah terkumpul dari hasil kuesioner dan observasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Dalam proses ini, tidak semua data diuraikan, melainkan hanya temuan-temuan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian yang dideskripsikan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan serangkaian pengujian yang meliputi uji kredibilitas, reliabilitas, validitas eksternal, dan objektivitas. Kredibilitas data diperkuat melalui beberapa cara, seperti perpanjangan masa pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, diskusi dengan teman sejawat, dan proses *member check* kepada informan. Selanjutnya, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan memperkuatnya dengan teori atau pendapat ahli yang relevan. Hasil analisis akhir kemudian dideskripsikan secara detail untuk memberikan gambaran yang sistematis dan kredibel mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Politeknik Media Kreatif Jakarta (biasa disebut Polimedia) terletak di jalan Srengseng Sawah Raya No. 17 RT 08 RW 03 Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12630. Penelitian yang dilakukan di Politeknik Media Kreatif Jakarta ini melibatkan sekitar 353 responden yang seluruhnya merupakan mahasiswa Polimedia. Pemilihan responden dilakukan secara acak. Berikut hasil analisis data dari demografi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1. Karakteristik responden di Polimedia berdasarkan jenis kelamin (n=353)

Karakteristik Jenis Kelamin	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Laki-laki	187	53
Perempuan	166	47

Dari tabel 1 terlihat bahwa distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah responden laki-laki sebanyak 187 orang (53%) dan responden perempuan sebanyak 166

orang (47%). Hasil penelitian gambaran persepsi mahasiswa terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Politeknik Media Kreatif adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Polimedia terhadap LGBT di Polimedia (n=353)

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Saya menjalankan ajaran agama sesuai agama saya	212 (60)	123 (34.8)	18 (5.1)	0	0
2	Media sosial berpengaruh terhadap pandangan saya tentang LGBT	47 (13.3)	108 (30.6)	83 (23.5)	85 (24.1)	30 (8.5)
3	Setiap manusia harus bersikap dan berperilaku sesuai jenis kelamin masing-masing	152 (43.1)	135 (38.2)	21 (5.9)	35 (9.9)	10 (2.8)
4	Transgender merupakan hal yang wajar dilakukan	4 (1.1)	8 (2.3)	70 (19.8)	113 (32)	158 (44.7)
5	Komunitas LGBT perlu diberi kebebasan karena Indonesia memegang teguh HAM	37 (10.5)	80 (22.7)	131 (37.1)	66 (18.7)	39 (11)
6	Laki-laki dan perempuan perlu diberi pendidikan sejak dini terkait identitas jenis kelamin	226 (64)	113 (32)	8 (2.3)	4 (1.1)	2 (0.6)
7	Saya tidak menganggap LGBT merugikan orang lain	69 (19.5)	157 (44.5)	82 (23.2)	28 (7.9)	17 (4.8)
8	Saya peduli dan ingin menyelamatkan teman saya, maka saya mengingatkan atau menasehati jika melihat teman yang terafiliasi LGBT	120 (34)	176 (49.9)	50 (14.2)	6 (1.7)	1 (0.3)
9	Perlukah pendidikan sex bagi generasi Z	226 (64)	113 (32)	8 (2.3)	4 (1.1)	2 (0.6)
10	Perlukah mahasiswa diberikan pengetahuan dampak psikhis dan fisik dari akibat pasangan sejenis	80 (22.7)	153 (43.3)	84 (23.8)	24 (6.8)	12 (3.4)
11	Pendidikan Kewarganegaraan membekali mahasiswa baik dirinya dan lingkungannya dari pengaruh fenomena LGBT meskipun mereka saling berinteraksi dengan baik	80 (22.7)	176 (49.9)	68 (19.3)	19 (5.4)	10 (2.8)

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa persepsi mahasiswa yang menjawab sangat setuju terbesar adalah pada poin “Perlukah pendidikan sex untuk generasi Z” yaitu sebanyak 226 responden (64%). Sedangkan untuk jawaban sangat tidak setuju terbesar adalah pada poin “Transgender merupakan hal yang wajar dilakukan” yaitu sebanyak 158 responden (44.7%). Terkait menjalankan ajaran agama, mayoritas responden menjalankan agama sesuai ajarannya masing-masing.

Tabel 3. Hubungan Persepsi Mahasiswa Polimedia dengan Pendidikan Kewarganegaraan (n=353)

Perilaku Seksual	Persepsi				Jumlah		p
	Positif		Negatif				
	f	%	f	%	f	%	
Positif	296	83.7	40	11.3	336	100	0.038
Negatif	12	3.3	6	1.7	18	100	
Jumlah	308	87	46	13	353		

Berdasarkan data distribusi tabel 3 menunjukkan bahwa dari 353 responden didapat kesimpulan bahwa mahasiswa Polimedia yang memiliki perilaku seksual positif memiliki persepsi positif adalah sebanyak 296 orang (83.7%). Berdasarkan analisis uji chi square didapatkan angka signifikan $p = 0.0388$ ($@<0.05$) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan persepsi positif mahasiswa terhadap LGBT di kampus Polimedia Jakarta.

Pembahasan

Penelitian ini mengungkap sebuah paradoks dalam persepsi mahasiswa Politeknik Media Kreatif Jakarta terhadap fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), di mana terdapat tegangan antara nilai-nilai agama dan norma sosial dengan prinsip hak asasi manusia dan toleransi. Hasil analisis *chi-square* yang menunjukkan hubungan signifikan ($p = 0,038$) antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan persepsi positif mahasiswa menjadi temuan sentral. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran PKn berhasil menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, yang tercermin dari 83,7% mahasiswa dengan perilaku seksual positif juga memiliki persepsi positif. Namun, persepsi positif ini tidak serta-merta berarti penerimaan penuh terhadap perilaku LGBT. Data menunjukkan penolakan kuat terhadap transgender sebagai hal yang wajar (76,7% tidak setuju/sangat tidak setuju) dan mayoritas mahasiswa (81,3%) merasa perlu bersikap sesuai jenis kelamin. Kontradiksi ini menggambarkan dilema yang dihadapi generasi muda: di satu sisi mereka dididik untuk menghargai hak asasi, namun di sisi lain mereka terikat pada norma agama dan sosial yang dominan di Indonesia (Mustofa et al., 2023; Salsabila et al., 2024).

Pandangan mahasiswa yang menolak perilaku LGBT namun tetap menunjukkan sikap toleran dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari nilai-nilai Pancasila yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan moral bagi mayoritas responden (94,8% menjalankan ajaran agama) untuk memandang perilaku LGBT sebagai penyimpangan, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ajaran agama lainnya. Namun, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendorong mereka untuk menolak diskriminasi dan kekerasan terhadap individu LGBT. Sikap ini tercermin dari mayoritas responden (64%) yang tidak menganggap LGBT merugikan orang lain dan tingginya keinginan untuk menasihati teman yang terafiliasi LGBT (83,9%) sebagai bentuk kepedulian. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya berhasil membentuk warga negara yang mampu memisahkan antara perbuatan yang dianggap menyimpang dengan manusianya, sejalan dengan pandangan Abdusshomad (2023) bahwa Islam menentang perbuatannya, bukan individunya.

Tingginya dukungan mahasiswa terhadap pendidikan seks (96% setuju/sangat setuju) dan edukasi mengenai dampak psikis dan fisik dari hubungan sejenis (66% setuju/sangat setuju) menandakan adanya kesadaran kritis di kalangan generasi Z mengenai pentingnya pengetahuan

sebagai basis pengambilan sikap. Mereka tidak hanya bersandar pada dogma, tetapi juga mencari pemahaman yang lebih rasional dan ilmiah. Kebutuhan akan edukasi ini menjadi sangat relevan mengingat pengaruh media sosial yang signifikan terhadap pandangan mereka (43,9% setuju/sangat setuju). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa berada di tengah pertarungan narasi antara informasi yang mereka terima dari media digital dengan nilai-nilai yang mereka peroleh dari pendidikan formal dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, institusi pendidikan memiliki peran strategis untuk menyediakan literasi media dan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif, objektif, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentengi mahasiswa dari informasi yang keliru dan membentuk persepsi yang lebih seimbang.

Meskipun terdapat hubungan signifikan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan persepsi positif, keraguan yang cukup besar mengenai pemberian kebebasan bagi komunitas LGBT atas nama Hak Asasi Manusia (37,1% ragu-ragu) menunjukkan adanya ambiguitas dalam pemahaman konsep HAM itu sendiri. Hal ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas di tingkat nasional, di mana terjadi benturan antara universalisme HAM dengan partikularisme nilai-nilai lokal dan agama. Sebagian mahasiswa tampaknya memahami HAM dalam kerangka yang dibatasi oleh norma sosial dan Pancasila, sejalan dengan argumen bahwa kebebasan individu tidak bersifat absolut dan harus selaras dengan ketertiban umum. Keraguan ini menjadi sinyal penting bagi para pendidik Kewarganegaraan untuk memperdalam diskusi mengenai interpretasi dan batasan HAM dalam konteks Indonesia, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan tidak terjebak dalam simplifikasi bahwa HAM berarti kebebasan tanpa batas (Munir & Ilham, 2022; Putri, 2022).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lesi et al., (2024) yang juga menemukan adanya hubungan antara pengetahuan dengan persepsi positif, di mana mahasiswa yang berpengetahuan baik cenderung memiliki persepsi yang lebih terstruktur mengenai LGBT sebagai sebuah penyimpangan. Dalam penelitian ini, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai sumber pengetahuan normatif yang membentuk kerangka berpikir mahasiswa. Dengan memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, dan norma sosial, PKn membekali mahasiswa dengan alat untuk menganalisis fenomena kompleks seperti LGBT. Hubungan signifikan yang ditemukan menegaskan bahwa pendidikan formal memiliki kekuatan untuk membentuk cara pandang dan sikap warga negara. Hal ini mengimplikasikan bahwa kurikulum PKn perlu terus diperbarui agar relevan dengan isu-isu kontemporer dan mampu memfasilitasi dialog kritis mengenai topik-topik sensitif di tengah masyarakat yang majemuk (Hamilaturroyya & Adibah, 2025; Megasari & Abdulkarim, 2020).

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan peran Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan agama sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter dan pandangan mahasiswa terhadap isu-isu sosial yang kompleks. Institusi pendidikan tinggi, khususnya Polimedia, perlu merancang program edukasi yang tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga dialogis dan kritis. Mengadakan seminar, lokakarya, atau diskusi terpumpun yang membahas isu LGBT dari berbagai perspektif—hukum, agama, psikologi, dan sosiologi—dapat membantu mahasiswa membentuk pandangan yang lebih holistik. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan literasi media digital ke dalam kurikulum untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menyaring informasi secara kritis. Upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter, moral, serta dialog yang terbuka di lingkungan keluarga dan komunitas untuk membangun lingkungan sosial yang positif dan mendukung perkembangan identitas gender yang sesuai dengan norma yang berlaku (Adnan et al., 2022; Nasution et al., 2022; Sukino & Utami, 2020).

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, sehingga tidak dapat menggali kedalaman dan kompleksitas alasan di balik persepsi setiap responden. Penggunaan metode kualitatif seperti wawancara mendalam atau *focus group discussion* dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya. Kedua, penelitian ini dilakukan di satu institusi pendidikan, yaitu Politeknik Media Kreatif Jakarta, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi mahasiswa di Indonesia yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan yang sangat beragam. Ketiga, istilah "persepsi positif" dalam penelitian ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati, karena data menunjukkan bahwa persepsi tersebut lebih mengarah pada sikap toleran terhadap individu, bukan penerimaan terhadap perilaku LGBT itu sendiri. Penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan desain *mixed-methods* dan sampel yang lebih luas untuk memvalidasi temuan ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap adanya persepsi paradoks mahasiswa terhadap fenomena LGBT, yang ditandai oleh tegangan antara nilai agama dan norma sosial dengan prinsip toleransi hak asasi manusia. Temuan sentral menunjukkan hubungan signifikan antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan persepsi positif, mengindikasikan bahwa PKn berhasil menanamkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Namun, persepsi positif ini tidak berarti penerimaan penuh terhadap perilaku LGBT, yang secara tegas ditolak oleh mayoritas mahasiswa. Paradoks ini dapat dijelaskan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila: Sila Pertama menjadi landasan moral untuk menolak perilaku yang dianggap menyimpang, sementara Sila Kedua mendorong sikap kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menolak diskriminasi terhadap individunya. Dengan demikian, mahasiswa menunjukkan kemampuan untuk memisahkan antara perbuatan dengan pelakunya, sebuah sikap toleran yang kompleks di tengah dilema antara keyakinan pribadi dan penghargaan terhadap hak orang lain.

Kondisi ini diperumit oleh tingginya permintaan mahasiswa akan pendidikan seks yang komprehensif serta pengaruh signifikan dari media sosial, menempatkan mereka di tengah pertarungan narasi antara informasi digital dengan nilai-nilai dari pendidikan formal. Terdapat pula ambiguitas dalam pemahaman konsep Hak Asasi Manusia (HAM), di mana banyak yang ragu memberikan kebebasan penuh atas nama HAM, yang mereka pandang terbatas oleh norma lokal dan Pancasila. Implikasi praktis dari temuan ini adalah adanya kebutuhan mendesak bagi institusi pendidikan untuk memperkuat peran PKn dan pendidikan agama, menjadikannya lebih dialogis dan kritis. Penting untuk mengintegrasikan literasi media digital ke dalam kurikulum dan menyelenggarakan diskusi dari berbagai perspektif (hukum, psikologi, sosiologi) untuk membantu mahasiswa membentuk pandangan yang lebih holistik dan seimbang terhadap isu-isu sosial yang kompleks dan sensitif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, A., et al. (2023). LGBT dalam perspektif Islam, sosial kewarganegaraan dan kemanusiaan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(1).
- Adawiyah, F. R. A., et al. (2023). The threat of the LGBT community in Indonesia and how muslims should act. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 8(2), 196. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v8i2.10522>

- Adnan, D. R. A., et al. (2022). Pengembangan media poster sebagai media edukasi orangtua dalam membantu mencegah perilaku perundungan. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 9(2), 234. <https://doi.org/10.21009/jkkp.092.10>
- Arivia, G., & Gina, A. (2016). A study of LGBT community in Jakarta. *Jurnal Perempuan*, 4(1).
- Hamilaturroyya, H., & Adibah, I. Z. (2025). Dinamika pengembangan kurikulum di era digital dalam menjawab kesenjangan konsep dan praktik. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(3), 1245. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6631>
- Indrawadi, J., et al. (2021). LGBT in student knowledge and attitudes: Value education perspective. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 601. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v10i3.23350>
- Izzuddin, A. F., & Cahyadi, T. (2025). Krisis pernikahan di era digital: Studi netnografi tiktok tentang generasi Z dan relevansinya terhadap hukum keluarga Islam. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 858. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6180>
- Khusnan, A., & Syaifullah, M. A. (2021). Optimalisasi peran organisasi IPNU IPPNU dalam menanamkan karakter religius remaja. *FATAWA Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.37812/fatawa.v2i1.389>
- Lesi, O., et al. (2024). Penerapan model pembelajaran think pair share untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-B pada mata pelajaran PPKn di SMPN 2 Donggo. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3), 217. <https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3313>
- Manurung, A. M., & Yunita, S. (2024). Pengaruh implementasi pembelajaran pendidikan pancasila berbasis kurikulum merdeka dalam membentuk good citizen di kelas VIII SMP Negeri 24 Medan. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3), 312. <https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3347>
- Megasari, I. I., & Abdulkarim, A. (2020). The implementation of curriculum 2013 at civic education as an effort to improve competence building of citizens in facing global competition. *Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.028>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, S., & Ilham, L. (2022). Restrictions to freedom of association, assembly, and spreading opinion post changes to community organizational law. *Constitutionale*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i1.2507>
- Mustofa, M., et al. (2023). How to deal and negotiate with the campus environment? Female students' experiences in reconstructing gender identity. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 10(3), 18. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1618>
- Nasution, N. B., et al. (2022). Designing e-character online: An examining on Indonesian undergraduate students. *MORFAI JOURNAL*, 2(3), 513. <https://doi.org/10.54443/morfai.v2i3.407>
- Nugraha, M. T. (2017). Kaum LGBT dalam sejarah peradaban manusia. *Raheema*. <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.558>
- Oktarini, D., et al. (2025). Ilmu keislaman dan tantangan sosial di era globalisasi. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1210. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6426>
- Putri, D. W. D. (2022). LGBT dalam kajian hak asasi manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>

- Qomarauzzaman, Q. (2017). Sanksi pidana pelaku LGBT dalam perspektif fiqh jinayah. *Raheema*, 3(1). <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.563>
- Rahmani, A. K., et al. (2022). Pengaruh manajemen strategi kepala madrasah dan kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan dimasa pandemi covid-19. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v2i2.1242>
- Salsabila, E., et al. (2024). Menghadapi degradasi moral generasi muda melalui penerapan pendidikan Islam pada peserta didik. *Al-Tarbiyah Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 284. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i1.1038>
- Sukino, S., & Utami, S. P. (2020). Islamic religious education models in preventing negative behaviors of youth and adolescents. *Tarbawi Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 6(2), 193. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v6i02.3539>
- Utami, S. G. A., & Najicha, F. U. (2022). Kontribusi mahasiswa sebagai agent of change dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat. *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 96. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i3.591>
- Yuliati, H. (2023). Isu gender dalam perspektif agama dan perundang-undangan. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 3(3), 128. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v3i3.2400>